

DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga, P. S. (2016). Peran badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak.
- Anggi Putri, D. (2014). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Tahun 2013-2014. *Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 1–13.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Kontektual*. Jakarta.
- Fadlurrahman, L. (2014). Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Lalu. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, 18(2), 1–33.
- Firdaus, E. (2014). Implementasi Undang-Undang Pkdrt Di Kota Batam Emilda, (9).
- Hartati, M. (2013). Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)), 1(3), 1094–1106.
- Helmi, I. M. (2014). “Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)” Muhammad, II.No 2.
- Kekerasan, L., Gang, D., Negara, A., & Tepat, B. (2017). Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 Labirin Kekerasan

- terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat. *Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun*, 1–4. Retrieved from [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017 Siaran Pers/Lembar Fakta Catahu 2017.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf)
- Kompasiana. (2018). Perlunya Layanan Pemerintah Berbasis Teknologi dan E-Government di Era Digital. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/tyobarsei/5ab84afeab12ae150718ed72/era-millennials-layanan-pemerintah-harus-berbasis-teknologi-dan-e-government>
- Lilik Nur, H. (2012). BAB 2 Kajian Teori pengertian kinerja, 8–31.
- Manumpahi, E., Shirley, G. . I. V. ., & Hendrik, P. W. (2016). Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, V. *No.1. t(1)*.
- Munandar, S. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta.
- Nasional, K. (2017). Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan>.
- Nurcholis, H., Enceng, & Amin, Z. (2014). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. (Nining, Ed.) (2nd ed.). Tangerang Sealtan: Universitas Terbuka.
- Pratiwi. (2017). Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017, 1, 1–80.
- Prokabar.com. (2018, September). Peran Dalam Kesetaraan Gender Dalam Perguruan Tinggi Harus Ditingkatkan. *Redaksi5*. Retrieved from

<https://prokabar.com/peran-dalam-kesetaraan-gender-dalam-perguruan-tinggi-harus-ditingkatkan/>

Rafikah, & Rahmawati. (2015). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Bukittinggi. *Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 173–186.

Risnandar. (2014). Analisis e-government dalam Peningkatan pelayanan publik pada dinas komunikasi dan informatika provinsi sulawesi tengah. *Ilmu Pemerintahan*, 2 No.7, 192–199.

Sri Lestari. (2017). No Title. [Http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39180341](http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39180341).

Sudarmanto. (2015). *analisis kinerja*.

sudira, K. (2016). *Mediasi Penal*. Yogyakarta: UII Press.

Sugiyono. (2016a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016b). *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung.

Sulaeman Munandar. (2010). *kekerasan terhadap perempuan*. bandung.

Tempo.co. (2019). Perempuan Bekerja dan Berpendidikan Tak Lepas dari KDRT, Sebabnya.

Yenti, S. dan M. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi, 17(2), 265–277.

Yeremias, K. (2008). *Administrasi Publik*. Yogyakarta.